

ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019

Endang Yektiningsih

endangyn@gmail.com

Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2019 dan mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019.

Metode analisis yang digunakan ini adalah perspektif analisis kemiskinan multidimensi pada indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan di Kota Kediri berupa analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Kediri dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend menurun meskipun tidak terlalu progresif dengan rata-rata penurunan selama periode 2015-2019 sebesar 0,16 persen per tahun; Tahun 2019, persentase penduduk miskin Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 0,52 persen (± 1.360 jiwa) dibandingkan dengan kondisi tahun 2018; Tahun 2019, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi telah menunjukkan posisi lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;

Kata kunci : Kemiskinan, Penduduk, Multidimensi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud intervensi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

Tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kota/ Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Laporan tersebut dapat digunakan untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. Sehingga laporan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

Maksud dan Tujuan

Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang sesuai dengan acuan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaksanaan Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019 adalah:

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2019;
2. Mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Daerah.

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah dengan mengetahui struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per-kapita, serta perkembangan inflasi.

1. Struktur Ekonomi.

Struktur ekonomi daerah dapat diketahui dengan melihat peranan ber-bagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Besaran setiap lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Hingga saat ini lapangan usaha yang paling dominan di Kota Kediri adalah kategori lapangan usaha Industri dan Pengolahan.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur ekonomi Kota Kediri didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Kota Kediri.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB-ADHB Kota Kediri tahun 2019 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, yaitu men-capai 82,04 persen (angka ini meningkat dari 81,63 persen di tahun 2015). Selanjutnya Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,32 persen, keduanya meski berfluktuasi tetapi menunjukkan kecenderungan trend yang meningkat dibandingkan tahun 2015.

Lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, masing-masing memberikan kontribusi antara 1,5 persen sampai dengan 1,6 persen terhadap pembentukan PDRB-ADHB Kota Kediri di tahun 2019. Sementara itu lapangan usaha lainnya, masing-masing memberikan kontribusi di bawah 1 persen terhadap pembentukan PDRB-ADHB Kota Kediri di tahun 2019.

Perkembangan PDRB Kota Kediri yang menunjukkan kecenderungan trend meningkat selama tahun 2015-2019 adalah kategori lapangan usaha Industri pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Perusahaan, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan untuk kategori lapangan usaha lainnya menunjukkan kecenderungan trend yang menurun.

Jika di lihat berdasarkan pengelompokan lapangan usaha, kontribusi sektor primer (kategori A dan B), yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Kediri sebesar 0,22 persen di tahun 2019. Sedangkan di sektor sekun-der (kategori C, D, E, dan F), yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberikan andil sebesar 83,74 persen, dengan dominasi pada lapangan usaha Industri Pengolahan (82,04%).

Adapun pada kelompok lapangan usaha tersier (kategori G sampai dengan U), yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa memberikan kontribusi sebesar 16,05 persen, dengan penyumbang terbesar pada kelompok ini adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,32 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB-ADHK 2010) pada tahun 2019 mencapai 5,47 persen mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,43 persen. Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama sebesar 5,35 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02 persen.

Hal mendasar yang mempengaruhi kecilnya progres pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri, karena sebagian besar sektor lapangan usaha mengalami penurunan kecuali pada sektor lapangan usaha Penyedia Akomodasi, Makanan dan Minuman yang tumbuh sebesar 2,46 persen terhadap tahun 2018, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 1,84%, lapangan usaha Real Estat tumbuh sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,32 persen, dan lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 0,13 persen.

3. PDRB Per-Kapita.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Kediri atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 342,37 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 484,51 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini di-sebabkan masih dipengaruhi oleh lapangan usaha yang dominan yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan.

4. Inflasi.

Target inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai pemerintah. Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 93/PMK.011/ 2014 tentang sasaran inflasi tahun 2016, 2017, 2018 tanggal 21 Mei 2014 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2016-2018, masing-masing sebesar 4%, 4%, dan 3,5% dengan deviasi kurang lebih 1%. Selanjutnya sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan berdasarkan PMK No. 124/PMK.010/2017 dimana masing-masing sebesar 3,5%, 3% dan 3% dengan deviasi kurang lebih 1%.

Mengacu pada PMK tersebut, tingkat inflasi di Kota Kediri cenderung lebih mendekati kisaran target inflasi BI yang dilakukan oleh pemerintah dibanding dengan kondisi inflasi di Provinsi Jawa Timur maupun inflasi secara Nasional. Trend inflasi Kota Kediri juga lebih stabil sebagaimana kondisi tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan ini adalah perspektif analisis kemiskinan multidimensi pada indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan di Kota Kediri berupa analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Multidimensi

1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi adalah dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan dimensi

ketenagakerjaan dengan melihat capaian dan perkembangan tingkat pengangguran terbuka.

a. Persentase Penduduk Miskin.

Persentase penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar 7,16 persen, mengalami penurunan sebesar 0,52 persen jika dibandingkan kondisi pada tahun 2018.

b. Jumlah Penduduk Miskin.

Dengan persentase kemiskinan sebesar 7,16 persen, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebanyak 471.893 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar \pm 4.056 ribu jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar \pm 24.790,6 ribu jiwa. Dengan demikian Kota Kediri pada tahun 2019 memberikan kontribusi se-besar 0,51 persen terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan se-besar 0,08 persen terhadap jumlah penduduk miskin secara Nasional.

c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar 1,23 mengalami kenaikan sebesar 0,36 digit jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018. Pada tahun yang sama indeks ke-dalaman kemiskinan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,61 sedang-kan indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 1,50. Maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Kediri masih lebih rendah terhadap tingkat kesenjangan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks keparahan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar 0,32 mengalami kenaikan sebesar 0,14 digit jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun yang sama indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,37 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 0,36. Maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Kediri masih lebih baik karena berada di bawah tingkat kesenjangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar 4,22 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,59 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018. Bila melihat capaian TPT di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan angka 3,92 persen dan secara Nasional sebesar 5,28 persen, maka TPT Kota Kediri lebih buruk terhadap TPT di Provinsi Jawa Timur tetapi masih lebih baik terhadap TPT secara Nasional. Dengan demikian TPT di Kota Kediri pada tahun ini berada pada kategori Sedang.

2. Dimensi Pendidikan

Kondisi kemiskinan multidimensi di tinjau dari dimensi pendidikan dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang pendidikan selama kurun waktu 2015-2019 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi dan Nasional.

a. Perkembangan capaian indikator bidang pendidikan.

Dari 10 indikator pada dimensi pendidikan di Kota Kediri, hampir semua indikator menunjukkan capaian pada tahun 2019 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya (tahun 2018), kecuali pada indikator APK/APM jenjang pendidikan SMA sederajat, , serta indikator AMH penduduk usia 15+ yang menunjukkan kondisi capaian tahun 2019 lebih baik/sama dengan tahun sebelumnya.

b. Capaian indikator pendidikan terhadap Provinsi dan Nasional.

Dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019, target APK SD/MI/Paket A untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 116,98, APK SMP/MTs/Paket B sebesar 137,34, APM SD/MI/Paket A sebesar 109,30, APM SMP/MTs/Paket B, sebesar 107,14. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2019 ini hanya mampu direalisasikan pada kisaran 94-97 persen.

c. Upaya yang telah dilakukan.

Beberapa program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri pada dimensi pendidikan selama tahun 2019 adalah:

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa:
 - 1) Pengadaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah untuk 6.000 siswa dengan total anggaran sebesar Rp. 7.241.900.000,-
 - 2) Penyelenggaraan BOS untuk SD/SMP sederajat serta Pesantren dengan total anggaran sebesar RP. 19.775,802.988,-
- Program Pendidikan Anak Usia Dini, berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD pada 3 lembaga PAUD dengan total anggaran sebesar Rp. 215.400.000,-
- Program Pendidikan Non Formal, berupa:
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Ujian-ujian Paket (Paket A, B, dan Paket C), dengan sasaran 300 orang dan dengan total anggaran sebesar Rp. 146.250.000,-
 - 2) English Massive (EMAS), Kelompok Children. Teenagers dan Adult dengan total anggaran sebesar Rp. 1.906.470.000,-
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, salah satunya berupa Bantuan Sosial Mahasiswa Miskin (Mahasiswa Kota Kediri BDT) untuk 255 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,-
- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat, salah satunya berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,-

3. Dimensi Kesehatan

Kondisi kemiskinan multidimensi ditinjau dari dimensi kesehatan dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang kesehatan selama kurun waktu 2015-2019 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi dan Nasional.

a. Perkembangan capaian indikator bidang kesehatan.

Dari 6 indikator pada dimensi kesehatan di Kota Kediri, semua indikator menunjukkan capaian pada tahun 2019 yang lebih baik dari tahun sebelumnya (tahun

2018), kecuali indikator Balita Gizi Buruk. Berdasarkan deret waktu pada periode tahun 2015-2019, hanya indikator Rasio Bidan per 100 ribu penduduk yang menunjukkan perkembangan trend menurun.

b. Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator dimensi kesehatan di Kota Kediri pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun yang sama, tidak terdapat indikator yang bermasalah, dalam arti tidak terdapat capaian indikator dimensi kesehatan Kota Kediri yang menunjukkan capaian lebih buruk terhadap Provinsi maupun Nasional.

Merujuk pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019, indikator Angka Kematian Bayi telah mencapai target yakni 2,55 per 1.000 kelahiran hidup dari target RPJMD yang menetapkan angka sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, indikator Angka Kematian Ibu juga belum mencapai target yakni 0,00 per 100.000 kelahiran hidup dari target RPJMD sebesar 98,5 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan indikator Balita Gizi Buruk juga telah memenuhi target RPJMD yang menetapkan target Tahun 2019 kurang dari 15 persen.

c. Upaya-upaya yang telah dilakukan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam dimensi kesehatan selama tahun 2019 adalah:

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, salah satunya adalah Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 274.147.500,-
- Program perbaikan gizi masyarakat dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 625.408.930,-
- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 197.580.000,-
- Program upaya kesehatan masyarakat dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 276.115.500,-
- Program obat dan perbekalan kesehatan dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.838.026.777,-
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan pola hidup sehat di masyarakat dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 3.107.401.400,-

4. Dimensi Sarana Prasarana/Infrastruktur Dasar

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator pada dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar pada kurun waktu 2015-2019 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi maupun Nasional.

a. Perkembangan capaian indikator bidang prasarana dasar.

Dari 5 (lima) indikator dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar di Kota Kediri selama tahun 2015-2019, 4 (empat) yaitu indikator akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan akses elektrifikasi meski berfluktuasi tetapi masih menunjukkan trend perkembangan yang membaik. Sedangkan indikator rumah

tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal sebagai milik sendiri yang menunjukkan kecenderungan trend menurun.

b. Capaian indikator Infrastruktur dasar terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator-indikator dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar Kota Kediri pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama hampir seluruh indikator pada dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar di Kota Kediri menunjukkan posisi relatif dengan capaian yang lebih baik terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional, kecuali indikator rumah tangga dengan status penggunaan/kepemilikan atas bangunan tempat tinggal milik sendiri.

c. Upaya-upaya yang telah dilakukan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam dimensi Prasarana/infrastruktur dasar selama tahun 2019 adalah:

- Program Lingkungan Sehat Perumahan, berupa Fasilitasi Bantuan dan Pelindungan Sosial bagi Keluarga Miskin (RTLH) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 160.349.000,-
- Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, salah satunya berupa Bantuan untuk Rehabilitasi RTLH, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-

5. Dimensi Ketahanan Pangan.

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi ketahanan pangan dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2015-2019) dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi dan Nasional.

a. Perkembangan capaian indikator dimensi ketahanan pangan.

Dari indikator-indikator pada dimensi ketahanan pangan di Kota Kediri selama periode tahun 2015-2019, hampir semua indikator rata-rata harga kebutuhan pangan pokok menunjukkan perkembangan rata-rata harga yang fluktuatif dengan kecenderungan trend yang memburuk (meningkat), kecuali pada rata-rata harga kedelai lokal. Sedangkan perkembangan proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan trend menurun (membaik).

b. Capaian indikator ketahanan pangan terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian indikator dimensi ketahanan pangan di Kota Kediri pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama antara lain sebagai berikut:

- Rata-rata harga bawang merah menunjukkan rata-rata harga lebih tinggi terhadap rata-rata harga di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
- Rata-rata harga daging sapi lkal; daging ayam ras; bawang putih; dan rata-rata harga kedelai lokal menunjukkan rata-rata harga lebih rendah terhadap rata-rata harga di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
- Sementara harga komoditi lainnya lebih rendah atau lebih tinggi terhadap rata-rata harga di tingkat Provinsi atau rata-rata harga secara secara Nasional.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagaimana Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), Pemerintah Kota Kediri dalam upaya penanggulangan kemiskinan, juga menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ke dalam 4 (empat) kelompok program atau klaster, yaitu:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Kediri telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kerja Pemerintah Kota Kediri. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
 - c. pengoordinasian OPD/gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. pengoordinasian OPD/gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kediri. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota/Wakil Walikota dan TKPK Provinsi.

Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:

1. Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
 1. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan.
 2. Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 3. Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
 - a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
 - d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.

Masing-masing kelompok program bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai pibidangnya.

Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri dilaksanakan dengan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

1. masukan (input);
2. kegiatan (process);
3. keluaran (output);
4. sasaran (outcome);
5. tujuan (goals).

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:

1. monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran;
3. evaluasi terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (outcome) kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. survey : mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sample yang representative

2. metode partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal

Kunjungan lapangan (spot check/rapid appraisal): Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya. Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pokja Pengaduan Masyarakat dalam TKPK bersama dengan Perangkat Daerah terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) pelaksana dari setiap Program dan kegiatan dimaksud.

Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Secara luas, pengertian pengaduan masyarakat pada program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri adalah langkah tindakan masyarakat yang ditujukan pada Pemerintah Kota Kediri, menyangkut:

- Upaya masyarakat untuk memperoleh informasi/kejelasan mengenai suatu program/kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
- Upaya masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat miskin;
- Upaya masyarakat untuk menyampaikan komplain terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Kediri menyediakan website yang bisa di akses masyarakat luas. Website tersebut berisikan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri, beserta sarana penyampaian usulan atau aspirasi untuk pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kondisi Kemiskinan Multidimensi

- Persentase penduduk miskin di Kota Kediri dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend menurun meskipun tidak terlalu progresif dengan rata-rata penurunan selama periode 2015-2019 sebesar 0,16 persen per tahun;
- Tahun 2019, persentase penduduk miskin Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 0,52 persen (± 1.360 jiwa) dibandingkan dengan kondisi tahun 2018;
- Tahun 2019, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi telah menunjukkan posisi lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;
- Perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2015-2019) menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2019 lebih tinggi terhadap tahun 2018, sementara untuk posisi relatif, untuk tahun 2019 TPT Kota Kediri sedikit lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur tetapi lebih rendah terhadap capaian secara Nasional;
- Indikator-indikator yang perlu perhatian (menjadi fokus) untuk mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini adalah sebagaimana tabel berikut:

*Analisis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri Tahun 2019**(Endang Yektiningsih)*

Bidang	Indikator yang perlu mendapat Intervensi	Keterangan	
		Posisi Relatif terhadap Provinsi dan Nasional	Trend
(1)	(2)	(3)	(4)
Ketenaga kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	lebih tinggi dari capaian Provinsi, lebih rendah dari capaian Nasional	menurun, tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018
Kesehatan	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	lebih tinggi dari capaian Provinsi maupun capaian Nasional	menurun, tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018
	Rasio Bidan	lebih tinggi dari capaian Provinsi maupun capaian Nasional	menurun, tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018
Infrastruktur Dasar	Rumah Tangga dgn status kepemilikan rumah milik sendiri	lebih rendah dari capaian Provinsi, lebih tinggi dari capaian Nasional	menurun, tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018
Ketahanan Pangan	Harga Beras	lebih tinggi dari rata ² harga Provinsi dan lebih rendah dari rata ² harga Nasional	meningkat, tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018
	Harga bawang merah	lebih tinggi dari rata ² harga Provinsi dan Nasional	meningkat, tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018
	Harga minyak goreng curah, telur ayam ras, cabai merah, jagung pipilan kering	lebih tinggi dari rata ² harga Provinsi, lebih rendah dari rata ² harga Nasional	meningkat, tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018
	Harga gula pasir lokal	lebih tinggi dari rata ² harga Provinsi, lebih rendah dari rata ² harga Nasional	menurun, tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018
	Harga daging sapi lokal, daging ayam ras	lebih rendah dari rata ² har-ga Provinsi dan Nasional	meningkat, tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

- Memiliki regulasi yang secara spesifik, jelas dan tegas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama;
- Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung mau-pun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:
- Belum memanfaatkan analisis untuk menentukan fokus dan lokus dalam perencanaan program;
- Antar program belum menunjukkan adanya komplementaris.
- Ruang fiskal pendapatan daerah masih di bawah 50 persen, dengan rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen), dengan demikian Kota Kediri masih sangat tergantung dengan pihak eksternal dalam membiayai program-programnya, termasuk program penanggulangan kemiskinan.

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan:

- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah terbentuk dengan Surat Keputusan Walikota Kediri;
- TKPK masih perlu ditingkatkan, dalam hal:
- Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan antar Perangkat Daerah;
- Pengendalian melalui monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Sarana dan prasarana kesekretariatan TKPK masih belum memadai.

Rekomendasi

1. Kepada Pihak Terkait :

Ditujukan kepada	Isi Rekomendasi
Pemerintah Kota Kediri	memperkuat pelaksanaan program penanggulangan ke-miskinan melalui kebijakan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Walikota/Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan, ▪ Tata cara/mekanisme pemanfaatan data DTKS yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas terkait, bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan sebagainya.
Sekretaris TKPK	memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan per-alatan dan personil kesekretariatan yang memiliki kualifikasi dalam mengelola data-data kemiskinan menjadi informasi yang <i>up to date</i> .
Ketua Pokja Data dan Informasi, TKPK	mengembangkan sistem manajemen informasi data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis DTKS dan data lain-nya.
Ketua Pokja Kemitraan, TKPK	<ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (<i>corporate social responsibility</i>), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media; 2) menyusun <i>directory</i> lembaga-lembaga mitra program yang telah siap bermitra dalam program penanggulangan kemiskinan.
Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat, TKPK	<ol style="list-style-type: none"> 1) merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 2) menyiapkan personil pengelola pengaduan masyarakat; 3) mengembangkan sistem pengaduan berbasis web.
Wakil Ketua TKPK	meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster;

2. Menjadikan sebaran-sebaran kecamatan yang menjadi prioritas wilayah intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fokus masalah masing-masing dimensi.

3. Dalam menghadapi perilaku sebagian masyarakat yang mengaku miskin, baik yang dilakukan atas dasar kesadaran, keinginan diri sendiri, mau-pun pengaruh dari lingkungan. Perlu di pahami bahwa makna dibalik perilaku masyarakat yang mengaku miskin dapat disebabkan karena masyarakat tersebut menginginkan bantuan dari pemerintah, meng-anggap bahwa bantuan dari pemerintah hak bagi setiap warga Negara Indonesia, beranggapan bahwa bantuan yang berasal dari pemerintah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, segala bentuk bantuan dari pemerintah seharusnya dibagi rata, dan seterusnya.

Perilaku mengaku miskin tidak mudah untuk dihilangkan, apalagi program bantuan dari pemerintah yang berbentuk “instan/charity” masih tetap dibagikan, ditambah lagi dengan adanya aktor-aktor masyarakat yang juga berperilaku miskin tanpa rasa malu dan merasa mampu menghadapi pandangan negative masyarakat.

Sebagai rekomendasi dalam menghadapi hal tersebut, diantaranya:

- a. Melakukan penyadaran secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa penanganan fakir miskin, termasuk pendataan dengan benar, adalah merupakan amanat undang-undang yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2011, yang memiliki ketentuan pidana (pasal 42), baik berupa kurungan/penjara maupun denda bagi setiap orang yang memalsukan data validasi dan verifikasi fakir miskin;
- b. Menempatkan Walikota dan Wakil Walikota serta para pejabat tinggi di Pemerintahan sebagai best practice dalam menerapkan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2011;
- c. Bekerjasama dengan penegak hukum guna menerapkan pembela-jaran terhadap masyarakat yang disinyalir melanggar ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Dinas Kesehatan Kota Kediri. 2019. *Profil Kesehatan Kota Kediri Tahun 2019*. Kediri: Dinkes Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2019. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019*. Surabaya: Dinkes Provinsi Jawa Timur.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2019*. Jakarta: Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. Panduan Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014. Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah. Jakarta: TNP2K.

-----, Outline. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan – Tahun 2013. ---

-----, <https://www.bps.go.id/>

-----, <https://www.jatim.bps.go.id/>

-----, <http://www.kemdikbud.go.id>

-----, <http://www.kemkes.go.id>

-----, <http://siskaperbapo.com/harga/tabel>